

KEBIJAKAN DIKLAT MILITER UNTUK PROFESIONALISME TNI

POLICY MILITARY TRAINING AND EDUCATION TO PROFESSIONALISM TNI

Ryan Budi Rusmana*, Muh Azis Muslim

Department of Public Policy and Administration, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

*Korespondensi email: ryan.budi@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan TNI AD khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD (Itjenad) dalam mewujudkan profesionalisme prajurit melalui program pelatihan dan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan *post-positivisme* melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan TNI AD dalam mendorong terbentuknya profesionalisme prajurit. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara secara purposif kepada informan kunci serta menggunakan data sekunder melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahunan Itjenad. Data kemudian diolah menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dan analisis menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 jenis pelatihan dan 6 jenis pendidikan yang menjadi basis pengembangan profesionalisme prajurit. Program pelatihan meliputi pelatihan kemampuan prajurit tingkat perorangan program latihan standarisasi (Proglatsi), non-Proglatsi, perencanaan dan anggaran, program administrasi pelatihan, program kerjasama latihan militer antara TNI AD dengan militer negara-negara non ASEAN dan ASEAN. Sementara pendidikan militer meliputi pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikilpengtek) dan pendidikan peralihan (Dikalih). Secara khusus, program tersebut dijalankan Itjenad dengan memfokuskan pada 2 program yaitu pelatihan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi dan pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes). Hasil pelaksanaan program tersebut tahun 2022 menunjukkan pelatihan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi mencapai target terpenuhi sebesar 100 persen, sementara pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) terpenuhi 87 persen dari target. Program pelatihan dan pendidikan militer mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme TNI AD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata kunci: Profesionalisme TNI; pelatihan; Pendidikan, kebijakan

ABSTRACT

This study aims to describe the policies of the Indonesian Army, especially within the Inspectorate General of the Indonesian Army (Itjenad) in realizing the professionalism of soldiers through training and education programs. Using a post-positivism approach through qualitative methods, this research explores the Army's policies in encouraging the formation of soldier professionalism. Data collection uses primary data through purposive interviews with key informants and uses secondary data through the Itjenad annual accountability performance report (LAKIP). The data was then processed using the Miles and Huberman approach and analyzed using the illustrative method. The results showed that there are 5 types of training and 6 types of education that are the basis for developing soldiers' professionalism. Training programs include non-Proglatsi individual level soldier ability training, standardization training programs (Proglatsi), planning and budgeting (REN), training administration programs, military training cooperation programs between the Army and the military of non-ASEAN and ASEAN countries. Meanwhile, military education includes first education (Dikma), formation education (Diktuk), general development education (Dikbangum), specialization development education (Dikbangspes), science and technology education (Dikilpengtek) and transition education (Dikalih). In particular, the program is carried out by Itjenad by focusing on 2 programs, namely the training of non-Proglatsi individual soldiers and specialization development education (Dikbangspes). The results of the implementation of the program in 2022 showed that the training of non-Proglatsi individual-level soldiers reached the target of 100 percent, while specialization development education (Dikbangspes) met 87 percent of the target. The military training and education program is able to increase the capacity and professionalism of the Army in carrying out its duties and functions.

Keywords: Professionalism; training; education; policy

PENDAHULUAN

Profesionalisme TNI mempunyai keterkaitan dengan masalah politik. Isu ini kerap dihadapkan pada masalah dwifungsi ABRI yaitu keterlibatan militer dalam politik praktis pada masa Orde Baru. Selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan,

militer juga sebagai kekuatan sosial-politik yang digunakan untuk melanjutkan status quo (Suryawan & Sumarjiana, 2020). Fenomena keterlibatan militer dalam politik disinyalir kuat menjadi faktor terjadinya pemerosotan profesionalisme militer. Dalam studi yang dilakukan Ouédraogo (2014) di

Afrika menunjukkan pelemahan profesionalisme militer disebabkan keberpihakan dukungan militer pada politik pemerintah. Militer bukan untuk melindungi warga negara namun kontrol militer dipandang sebagai kendaraan menuju kekuasaan politik.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Pada masa rezim otoritarian Orde Baru, TNI menjadi alat ampuh untuk mengawasi aktivitas politik masyarakat (Mietzner, 2006). TNI memiliki instrumen represif yang terstruktur hingga tingkat desa yang bergerak pada ranah politik (Gunawan, 2017). Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara. Dalam perjalanannya, peristiwa reformasi 1998 menjadi momentum reformasi internal TNI. Gelombang reformasi tidak hanya sebagai peristiwa politik, namun menjadi momentum transformasi dan reformasi internal TNI. Reformasi TNI ditandai dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit dan penghapusan Fraksi ABRI di Parlemen, dan melepaskan pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat TNI ketika Orde Baru serta menjadikan TNI sebagai institusi profesional (Setara Institute, 2019).

Reformasi menandai era baru dalam mewujudkan TNI yang profesional. Kejatuhan rezim Orde Baru telah mendorong perubahan di lingkungan TNI, dengan melepaskan TNI dari keterlibatannya dalam politik praktis yaitu dengan menghapuskan peran politik TNI dan membangun TNI yang profesional (Kristiadi, 2000). Reformasi politik nasional mendorong lahirnya reformasi internal TNI melalui perubahan, pembenahan, penataan dan perbaikan di lingkungan internal, melalui perubahan struktural, kultural, dan instrumental yang mengarah pada terwujudnya TNI yang profesional (Subagyo, 2017). Militer yang profesional yang mampu bersinergi dengan tatanan politik yang demokratis (Perlmutter, 2000) dan beroperasi di wilayah yang terpisah dari wilayah sipil dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Brooks, 2020).

Selain pada tuntutan reformasi internal, dalam konteks upaya tugas dan fungsinya, TNI juga dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis yang semakin berkembang dan kompleks. Profesionalisme TNI menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik yang sifatnya tradisional maupun non tradisional (Riyanto, 2017).

Kondisi lingkungan strategis yang semakin berkembang menuntut peningkatan profesionalisme TNI dalam menghadapi ancaman, salah satunya di kawasan Asia Pasifik. Perkembangan

kawasan ini memiliki peluang, tantangan, dan risiko yang dapat menimbulkan konflik antar-negara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antar-negara. Disisi lain, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, terorisme serta separatisme (Kementerian Pertahanan, 2015).

Dengan demikian, profesionalisme TNI merupakan kebutuhan yang harus menjadi prioritas. Untuk mewujudkan TNI yang profesional, Huntington (2003) menjelaskan profesionalisme militer harus memiliki peningkatan pada keahlian spesifik, pengetahuan serta kemahiran melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta mengikuti perkembangan bidang profesinya. Militer merupakan unit khusus yang memiliki karakter, otonomi dan kemandirian dalam urusan internal, tradisi, dan kebiasaan yang khas dan berbeda dengan unit sosial lainnya (Fattah, 2005).

Lebih lanjut Djuyandi (2012) menjelaskan bahwa profesionalisme TNI harus didasarkan pada keahlian dan kemahiran dalam melaksanakan tugas pertahanan negara, bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis, memiliki disiplin, taat hukum, dan memiliki jiwa korsa yang tinggi, memiliki moral dan etika keprajuritan yang tinggi, menghargai dan membela rakyat secara proporsional serta menghargai supremasi sipil.

TNI dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan pada kemampuan untuk pertahanan negara. Menjadi prajurit profesional dibentuk melalui proses pembelajaran seumur hidup untuk menyempurnakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan militer (Khon, 2013). Militer modern telah mengadopsi pandangan yang lebih fleksibel dan maju secara teknologi dengan penekanan pada profesionalisme melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan untuk mengatasi dan menghadapi tantangan abad ke-21 (Malik, 2021)

Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji kebijakan TNI AD dalam mewujudkan profesionalisme prajurit khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD (Itjenad). Kebijakan profesionalisme TNI diwujudkan melalui program pelatihan dan pendidikan sebagai komponen dasar dalam pengembangan profesionalisme TNI secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pendidikan mendukung kemampuan dasar TNI untuk mengatasi berbagai potensi ancaman dan gangguan pertahanan negara.

Selain itu, Itjenad memiliki fungsi organik yaitu menyelenggarakan kegiatan bidang intelejen, operasi, latihan, personel, logistik, teritorial dan perencanaan yang mendukung pelaksanaan profesionalisme TNI AD. Itjenad memiliki program

pengembangan pelatihan dan pendidikan yang difokuskan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme prajurit.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivist* sebagai paradigma dan kerangka kerja dalam proses pengumpulan data penelitian melalui metode kualitatif (Denzin & Lincoln, 1994). Peneliti memilih metode ini sebagai cara untuk mengkaji masalah penelitian yang difokuskan pada pengkajian program pelatihan dan pendidikan TNI yang digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pendekatan dan metode kualitatif memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh pada berbagai kebijakan pelatihan dan pendidikan TNI.

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan teknik *purposive* dalam proses pemilihan informan. Peneliti memilih informan kunci (*key informan*) agar mendapatkan data dan informasi secara mendalam. Pemilihan informan antara lain Inspektur Utama I/Perencanaan (Irut I/Ren), Inspektur Utama II/Administrasi Latihan (Irut II/Minlat), Inspektur Utama III/Pembinaan Program Latihan Standarisasi (Irut III/Binproglatsi), Inspektur Utama IV/Pembinaan Non Program Latihan Standarisasi (Irut IV/Bin Non Proglatsi), Inspektur Utama V/Kerjasama Latihan ASEAN (Irut V/Kermalat ASEAN), Inspektur Utama VI/Kerjasama Latihan Non ASEAN (Irut VI/Kermalat Non ASEAN).

Selain itu, penelitan ini menggunakan data sekunder melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan Itjenad yang dianalisis secara ilustratif. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik olah data interaktif Miles dan Huberman (1992). Proses pengolahan data dilakukan secara simultan dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung dengan menyajikan 4 proses utama yaitu Pertama, peneliti memulai pengumpulan data dengan wawancara mendalam mengumpulkan data dan dokumen (sekunder) yang mendukung. Kedua, peneliti melakukan reduksi data dengan cara klusterisasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada kebijakan program pelatihan dan pendidikan. Ketiga, peneliti melakukan analisis data yang berasal dari data primer dan sekunder. Peneliti kemudian menyajikan data dan informasi yang didasarkan hasil data primer yang dikolaborasi dengan data sekunder. Keempat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada permasalahan dan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, TNI merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sebagai alat pertahanan negara, TNI mengamban tugas sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Komponen utama sistem pertahanan negara berperan sebagai penindak dan penyanggah awal setiap muncul ancaman. Kemampuan dan penampilan TNI secara profesional dalam peran tersebut harus senantiasa dijiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang perwujudannya diselenggarakan dengan upaya pembinaan Prajurit TNI secara terpadu, berlanjut dan konsisten dengan jaminan keseimbangan pembekalan kemampuan, keterampilan maupun pengalaman melalui pendidikan dan penugasan di lapangan.

Profesionalisme TNI sangat menentukan arah dan ruang gerak pertahanan negara. Profesionalisme berkaitan dengan daya dan kemampuan TNI menggerakkan sumber daya militer untuk mampu mendeteksi dan mengatasi berbagai potensi ancaman pertahanan negara. Proses reformasi ini bertujuan untuk senantiasa menjadikan TNI AD sebagai organisasi profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai amanat Undang- Undang.

TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dituntut untuk senantiasa peka dan waspada terhadap berbagai kemungkinan timbulnya ancaman. Untuk itu, sebagaimana Hantington (2003) menggarisbawahi bahwa profesionalisme militer dapat diraih melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman untuk meningkatkan kompetensi prajurit.

Dalam konteks ini, TNI AD terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya militer untuk meningkatkan profesionalisme prajurit agar dapat secara konsisten dan simultan menjadi tameng pertahanan negara yang kuat dan disegani lawan. Upaya meningkatkan profesionalisme TNI AD berfokus untuk menguatkan sistem pelatihan dan pendidikan prajurit secara terpadu, terencana dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap proses pelatihan dan pendidikan militer dapat menghasilkan prajurit yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni untuk siap sedia menghadapi berbagai ancaman pertahanan negara.

Adapun strategi yang dikembangkan TNI AD dalam meningkatkan profesionalisme seluruh personel TNI yaitu melalui proses pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan profesionalisme personel TNI AD untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) melalui pelatihan kemampuan prajurit tingkat perorangan non-proglatsi, proglatsi, rencana program dan anggaran, kerjasama latihan militer ASEAN dan Non ASEAN. Sementara dalam bidang pendidikan militer melalui Pendidikan Pertama (Dikma), Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikilpengtek), Pendidikan Peralihan (Dikalih).

Program latihan TNI AD merupakan penjabaran kebijakan, tugas fungsi dan sasaran latihan. TNI AD melaksanakan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar satuan untuk menjamin profesionalisme prajurit dan satuan TNI AD secara terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama dalam pelatihan TNI AD sebagai bentuk percepatan profesionalisme TNI AD antara lain :



Gambar 2. Program Pelatihan Militer TNI AD

Pertama, pelatihan kemampuan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi merupakan program latihan yang berada diluar program latihan standarisasi (Proglatsi) dengan proyeksi latihan sesuai dengan tipologi wilayah, penambahan dan pemeliharaan kemampuan spesialisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme prajurit TNI AD. Program ini bertujuan untuk sinkronisasi penyusunan dan pengawasan program latihan perorangan dan satuan diluar program latihan standarisasi. Program kegiatan ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD melalui beberapa kegiatan seperti latihan pembentukan Raider

(Lattuk Raider), pelatihan menembak secara terpadu dan pembinaan altet TNI untuk kegiatan nasional dan internasional.

Kedua, program latihan standarisasi (Proglatsi) yang memberikan pelatihan terstandarisasi sesuai dengan bidang dan keahlian. Program ini diselenggarakan disetiap kecabangan TNI dari tingkat pusat hingga Kotama maupun Pus/Cab/Fung TNI AD. Secara lebih spesifik, program ini menyasar langsung pada peningkatan kemampuan prajurit TNI AD pada bidang Satuan Tempur (Satpur), Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Intelejen (Satintel), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin), Satuan Komando Wilayah (Satkowil), Satuan Markas Besar (Sat Markas/Denma), Direktorat, Dinas, Satuan Lembaga Pendidikan (Satlemdik), Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI AD.

Ketiga, perencanaan dan anggaran untuk mewujudkan rencana program dan anggaran pelatihan. Tahapan ini penting untuk memberikan panduan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan secara terpadu dan berkelanjutan. Dukungan anggaran juga menjadi bagian yang penting untuk mendukung semua proses pelatihan. Untuk itu, perencanaan dan anggaran menjadi proses yang melekat dalam rangkaian proses kebijakan pelatihan untuk mewujudkan profesionalisme TNI AD.

Program administrasi pelatihan sebagai *supporting system* dalam mewujudkan profesionalisme TNI AD. Program ini dimulai dari proses pelatihan mengorganisir, menginventarisasi, mengawasi dan melaksanakan kajian terkait dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana latihan untuk mewujudkan inventarisasi sarana dan prasarana latihan satuan jajaran TNI AD secara tertib dan teratur sebagai aset milik TNI AD.

Keempat, program kerjasama latihan militer antara TNI AD dengan militer negara-negara Non ASEAN. Kegiatan kerjasama dilakukan melalui perumusan, penyelenggaraan dan evaluasi kerjasama latihan militer. Kegiatan ini terwujud dalam berbagai bentuk seperti rapat bersama, kunjungan perwira militer, pertukaran prajurit dan latihan gabungan yang diselenggarakan secara bersama-sama negara Non ASEAN. Kerjasama ini diperlukan TNI AD sebagai bentuk diplomasi militer serta meningkatkan posisi strategis TNI AD dalam mengembangkan kekuatan militer. Disisi lain, proses kerjasama dilakukan guna mempercepat proses *transfer of technology* dalam Alusista TNI AD melalui pertukaran ilmu pengetahuan militer, pengalaman serta *cross reference* TNI AD sebagai pengguna teknologi.

Kelima, program latihan bersama militer TNI AD dengan militer negara-negara tetangga ASEAN. Sebagai satu rumpun bangsa melayu dan negara tetangga, kerjasama ini penting untuk

membangun kekuatan regional ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Sebagaimana kerjasama negara Non ASEAN, kerjasama latihan bersama negara-negara ASEAN memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya membangun percepatan transfer teknologi, berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan *cross reference* dengan militer ASEAN.

Berikutnya, profesionalisme TNI dibangun dan diperkuat dengan pendidikan militer melalui pendidikan sekolah militer. Pendidikan sekolah militer diselenggarakan kepada prajurit yang bertujuan untuk membekali, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan militer yang disusun secara sistematis dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan khusus militer. Dalam pelaksanaannya, pendidikan profesional TNI khususnya pada jenjang perwira militer dilaksanakan melalui beberapa program yaitu



Gambar 3. Program Pendidikan Militer TNI AD (diolah peneliti, 2024)

Pertama, pendidikan pertama (Dikma). Dikma Perwira merupakan jalur pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan Sepa PK (Tahap I penyelenggaraannya oleh Mabes TNI). Pendidikan Pertama Perwira melalui Akademi Militer adalah pendidikan tingkat akademi dan Perwira Prajurit Karier (Pa PK) yang dilaksanakan oleh TNI AD. Hasil pendidikan Dikmapa melalui Akademi Militer memenuhi kualifikasi lulusan Perwira TNI AD berpangkat Letnan Dua sesuai korps masing-masing dan memiliki kualifikasi akademik Diploma-4 (D-4) dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han).

Kedua, pendidikan pembentukan (Diktuk). Pendidikan pembentukan dalam rangka membentuk dan mengembangkan prajurit Bintara TNI

AD yang memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat serta terpilih menjadi Perwira TNI AD. Proses pendidikan dilaksanakan melalui Sekolah Calon Perwira TNI AD (Secapaad) untuk membentuk Bintara terpilih menjadi Perwira yang memiliki kompetensi handal. Pemilihan prajurit Bintara berasal dari prajurit terpilih yang berpangkat Sersan Kepala (Serka), Sersan Mayor (Serma), Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan Pembantu Letnan Satu (Peltu).

Ketiga, pendidikan pengembangan umum (Dikbangum). Pendidikan pengembangan umum diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan serta pengetahuan terkait dasar keperwiraan. Dikbangum terdiri atas Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) I, Diklapa II dan Pendidikan Reguler Sekolah Komando dan Staf TNI AD (Dikreg Seskoad). Dikbangum dilaksanakan pada setiap kecabangan seperti kecabangan Infanteri, kecabangan Kavaleri, kecabangan Armed, kecabangan Arhanud, kecabangan Zeni, kecabangan Bekang, kecabangan Hub, kecabangan Pal, kecabangan Kes, kecabangan Ajen, kecabangan Top, kecabangan Ku, kecabangan Kum, dan kecabangan Pom. Pendidikan Pengembangan Umum secara menyeluruh menjangkau pada kecabangan sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing kecabangan.

Ketiga, pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes). Pendidikan pengembangan spesialisasi diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan spesialis baik yang telah maupun yang belum diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penugasan prajurit selanjutnya. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira terdiri atas Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Keahlian. Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan spesialisasi yang diselenggarakan untuk menanamkan, mengembangkan dan meningkatkan penguasaan bidang tertentu atau kejuruan sesuai dengan keahlian Perwira. Sementara Pendidikan Keahlian diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Perwira dalam keahlian dan keterampilan alam pengoperasian sistem senjata (alutsista) TNI AD.

Keempat, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikilpengtek). Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memfokuskan pada penguasaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi TNI AD. Beberapa contoh Dikilpengtek yang tersedia antara lain Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Lembaga Pengkajian dan Teknologi (Lemjiantek) dan Akademi Keperawatan (Akper).

Kelima, pendidikan peralihan (Dikalih). Dikalih merupakan pendidikan yang difokuskan untuk melengkapi dan memantapkan aspek pen-

didikan dasar golongan pangkat dari Bintara yang mendapat anugerah seperti Kenaikan Pangkat Luar Biasa.

Dalam konteks pelaksanaannya di Itjenad, program dalam rangka mendukung profesionalisme prajurit masuk dalam salah satu program strategis. Terdapat tiga program yang menjadi tugas pokok Itjenad yaitu Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit, Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan serta Program Dukungan Manajemen. Program profesionalisme dengan sasaran terwujudnya peningkatan profesionalisme personel TNI AD untuk melaksanakan tugas dalam OMP dan OMSP, dengan kegiatan terdiri dari kegiatan Latihan Matra Darat dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Matra Darat.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Itjenad guna mewujudkan profesionalisme TNI AD dilingkungan Inpektorat Jenderal difokuskan pada dua kegiatan. Pertama, kegiatan penyelenggaraan latihan Matra Darat untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme kemampuan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi. Target yang dicanangkan yaitu jumlah persentase sebesar 100 persen prajurit yang lulus dalam melaksanakan latihan perorangan Non Proglatsi berupa Pembinaan Jasmani Militer (Binjasmil), Menembak Senjata Ringan (Bakjatri), minggu militer dan latihan peningkatan profesionalisme prajurit. Berdasarkan data diatas, realisasi capaian dapat diraih sebesar 100 persen. Artinya seluruh program mampu dituntaskan dengan target optimal.

Tabel 1. Program Pelatihan dan Pendidikan Militer Itjenad (diolah peneliti, 2024)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peningkatan profesionalisme kemampuan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi.	Persentase prajurit yang lulus dalam melaksanakan Lator non Proglatsi melalui Latihan berupa Binjasmil, Bakjatri, dan minggu militer, latihan peningkatan profesionalisme dan MTT.	100 %	100%	100%
2	Terwujudnya personel yang terdidik dan berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan personel TNI AD yang profesional dari hasil pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes).	Persentase lulusan Dikbangspes dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes.	100%	87%	87%

Kedua, kegiatan pendidikan pengembangan spesialisasi Matra Darat untuk mewujudkan personel yang terdidik dan berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan personel TNI AD yang profesional dari hasil Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Persentase ditargetkan 100 persen mampu menghasilkan lulusan Dikbangspes dalam memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikbangspes. Berdasarkan hasil data diatas, realisasi Dikbangspes sebesar 87 persen, tidak memenuhi target dari 100 persen target yang direncanakan. Dengan demikian, pada aspek Dikbangspes masih membutuhkan percepatan agar pada periode selanjutnya dapat ditingkatkan.

Secara umum, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan profesionalisme TNI AD terus didorong lebih baik. Pendekatan ini merupakan komponen paling penting mewujudkan profesionalisme militer melalui pendidikan militer formal dan pelatihan kejuruan serta penyusunan program yang ditetapkan dengan jelas berdasarkan etika militer profesional (Paterson, 2019).

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji profesionalisme militer di beberapa negara, yang menggunakan pendekatan pelatihan dan pendidikan sebagai basis kebijakan pengembangan profesionalisme militer. Penelitian Esterhuyse dan Bester dalam Stouffer dan Lindsay (2012) tentang profesionalisme militer di Afrika Selatan menjelaskan bahwa program pelatihan dan pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk membangun dan memelihara profesionalisme militer. Cara ini dipandang sebagai sarana utama untuk pengembangan profesionalisme militer.

Penelitian Bentley dan Horn dalam Stouffer dan Lindsay (2012) juga menegaskan hal yang sama. Pelatihan dan pendidikan yang dikembangkan pada militer Kanada, justru mendorong profesionalisme berbasis pendidikan tinggi melalui pendidikan pascasarjana dan doktor bagi perwira militer. Kebijakan profesionalisme militer di Kanada berorientasi pada investasi melalui pendidikan tinggi.

Pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan merupakan komitmen yang diupayakan TNI AD agar memiliki sistem dan prajurit yang profesional. Peningkatan kapasitas dan kemampuan prajurit melalui pelatihan dan pendidikan secara terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan dapat secara agregatif mendorong kualitas dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

KESIMPULAN

Perkembangan lingkungan strategis semakin kompleks, sehingga tantangan dan ancaman dalam

pertahanan negara juga semakin berkembang. Untuk itu, profesionalisme TNI AD menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan yang digerakan secara masif, terstruktur, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan, profesionalisme TNI AD dapat terwujud sebagai sistem pertahanan negara. Dengan demikian, perlu optimalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD agar dapat memenuhi target yang lebih baik pada periode berikutnya. Salah satu cara yang direkomendasikan yaitu akurasi proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan secara terpadu sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi lebih optimal. Selain itu, program pengembangan pelatihan dan pendidikan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan ancaman lingkungan strategis yang semakin kompleks dengan penyesuaian pada metode, peralatan dan kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian ini, agenda penelitian berikutnya dapat memperdalam pada kajian respon anggota TNI terhadap kebijakan program pelatihan dan pendidikan sehingga dapat menggambarkan profesionalisme prajurit TNI secara faktual dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, Risa. (2020). Paradoxes of Professionalism: Rethinking Civil-Military Relations in the United States. *International Security* 2020; 44 (4): 7–44. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00374
- Denzin K., N., Lincoln S., Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. London- New Delhi: Sage Publications
- Djuyandi, Yusa. 2012. Membangun Demokrasi melalui Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, *Jurnal Humaniora*, Vol.3 No.2 Oktober 2012: 512-522
- Fattah. 2005. *Demiliterisasi Tentara*, Yogyakarta: LkiS
- Gunawan, Aditya Batara (2017) "Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 2, Article 2. DOI: 10.7454/jp.v2i2.1115 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/2>
- Huntington, S. P. (2003). *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Jakarta: PT Grasindo
- I Putu Nopa Suryawan, I., P., N., Sumarjiana, I., K., L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2020
- Kohn, R., H. (2013). First Priorities in Military Professionalism, *Jurnal Orbis*. Vol 57, Issue 3, 2013, Hlm. 380-389,
- Kristiadi, J. (2000). Profesionalisme TNI di Tengah Transisi Politik. *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I*.
- Miles, M., B., Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mietzner, Marcus. (2006). The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. Washington: East West Center.
- Malik, S., M. (2021). Profesionalism in Military: Theoretical and Practical. *Journal of Defense Resources Management*. Vol. 12, Issue 2 (23)/2021.
- Ouédraogo, E. (2014). *Advancing Military Professionalism in Africa*. Afrika Selatan. Africa Center for Strategic Studies
- Perlmutter, Amos. 2000. *Militer dan Politik*, Jakarta: Grafindo Persada
- Paterson, Pat. (2019). Measuring Military Professionalism in Partner Nations: Guidance for Security Assistance Officials, *Journal of Military Ethics*, Vol. 18, No. 2, 145–163
- Riyanto, Joko. (2017). Kewaspadaan Nasional Bela Negara dan Integrasi Nasional. *Jurnal Wira*. Volume 67/No 51
- Setara Institute. (2019). Jalan Sunyi Reformasi TNI. <https://setara-institute.org/jalan-sunyi-reformasi-tni/>
- Stouffer, J., Lindsay, D. (eds). (2012). *Threats to military professionalism: international perspectives*. Kanada: Minister of National Defence:
- Subagyo, A. 2017. Mewujudkan Profesionalisme TNI AD DI Era Reformasi, *Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat*, Vol. 2, Maret 2017